



## **Siaran Pers**

*untuk diterbitkan segera*

# **Kadin, ICHS dan BPJPH Gelar Kick Off Meeting Perdana untuk Pengembangan Industri Halal**

**Jakarta, 26 Februari 2024** - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Islamic Chamber Halal Service (ICHS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar *kick off meeting* perdana di Menara Kadin Indonesia. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan pada pembukaan acara "Makkah Halal Forum" pada 26 Januari 2024, untuk memperkuat industri halal secara global, terutama di negara-negara Islam atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Selain mendiskusikan pentingnya meningkatkan *awareness* kolaborasi tiga pihak untuk meningkatkan produk halal, pertemuan ini juga digunakan untuk meningkatkan keterlibatan berbagai pelaku usaha Indonesia melalui pembuatan database perusahaan yang ada di Indonesia dan negara-negara anggota ICHS lainnya.

**Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan**, mengatakan Indonesia memiliki kepentingan besar untuk memainkan peran penting dan memanfaatkan potensi ekonomi industri halal global yang terus berkembang dengan nilai menjanjikan. "Ini kesempatan yang besar bagi Indonesia untuk memainkan peran penting dan memanfaatkan potensi ekonomi agar bisa mewujudkan cita-cita menjadi *halal hub global*. Kerja sama ini merupakan komitmen Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar mencapai Indonesia Emas 2045," tuturnya.

**Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham** menyatakan, kerja sama ini merupakan kolaborasi strategis untuk membangun Industri Halal Global. "MoU dengan Kadin Indonesia dan ICHS ini merupakan kolaborasi strategis untuk membangun landasan kerja sama dalam mendukung Industri Halal Global, khususnya dengan negara anggota OKI," ungkap Aqil.

Aqil menambahkan BPJPH telah melakukan transformasi layanan sertifikasi halal diantaranya dengan melakukan penguatan layanan sertifikasi halal dengan memperluas sebaran LPH dan LP3H, serta mempersiapkan SDM layanan yang merata. "Kami masih terus berupaya memperkuat SDM di bidang halal ini dengan terus mendorong pelatihan-pelatihan Auditor Halal, Pendamping PPH, Penyelia Halal, Juru Sembelih halal, termasuk melalui 16 Lembaga Pelatihan JPH yang ada," jelas Aqil.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan industri halal. Menurut catatan BPJPH, hingga 24 Oktober 2023 sedikitnya ada 3,9 juta produk yang sudah bersertifikat halal.

Mengingat target pemerintah Indonesia agar bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*), maka kolaborasi dan perjanjian kerja sama perlu dilakukan. Kadin Indonesia percaya, MoU dengan BPJPH dan ICHS ini bisa membuka jalan bagi pelaku usaha agar lebih mudah untuk meningkatkan kualitas industri mereka.

**CEO ICHS, Ashraf El Tanbouly** turut menyambut baik nota kesepahaman dan Kick-Off Meeting lanjutan antara ICHS, Kadin Indonesia, dan BPJPH, sebagai mitra yang sangat strategis ini. "Kami melihat kolaborasi dengan Kadin Indonesia dan BPJPH dalam sebuah kemitraan strategis untuk



## **Siaran Pers**

*untuk diterbitkan segera*

mendorong upaya membangun Industri Halal Global, dimana Indonesia merupakan salah satu pemain penting global," tegas Ashraf.

Harapannya melalui kolaborasi ini pertumbuhan ekonomi bisa digapai. Melalui upaya-upaya ini Indonesia juga diharapkan menjadi negara berkekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia berdasarkan pada produk domestik bruto (PDB) paritas daya beli (PPP) pada 2045.

\*\*\*

## **Tentang Kadin Indonesia**

Berdiri pada tahun 1968 dan ditetapkan berdasarkan hukum pada 1987, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merupakan organisasi payung bagi seluruh kamar dagang dan serikat bisnis Indonesia, termasuk kamar dagang yang berasal dari luar negeri di Indonesia. Kadin Indonesia bertindak selaku suara sektor swasta dan menjalin hubungan erat dengan pejabat pemerintahan. Misi Kadin Indonesia adalah untuk mendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara vital, berkelanjutan, dan adil. Jaringan Kadin Indonesia yang mencakup 34 Kadin Provinsi dan 544 cabang distrik mewakili suara seluruh serikat bisnis meliputi semua sektor relevan dari ekonomi Indonesia. Bermitra dengan lembaga pemerintahan kunci, Kadin Indonesia merupakan mitra aktif dalam reformasi bisnis dan ekonomi. Kadin Indonesia adalah titik kontak pertama bagi perusahaan asing dan membuka pintu menuju sektor swasta di Indonesia yang dinamis.

Untuk informasi lanjutan:

### **Steven Polhaupesy**

Humas Sekretariat Kadin Indonesia  
steven.yohanes@kadin.id